

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Akasia No. 02

Nomor Telepon : -

Website : -

E-mail : diskominfops@inhilkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tembilahan, Januari 2026
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK


Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
NIP. 19820701 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja	17
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	18
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	18
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	20
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	24
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	25
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	27
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	31

3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	32
3.2	Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP		40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	12
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	13
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	18
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	21
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	24
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	26
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	28
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	31
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	33
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	4
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK mempunyai fungsi:

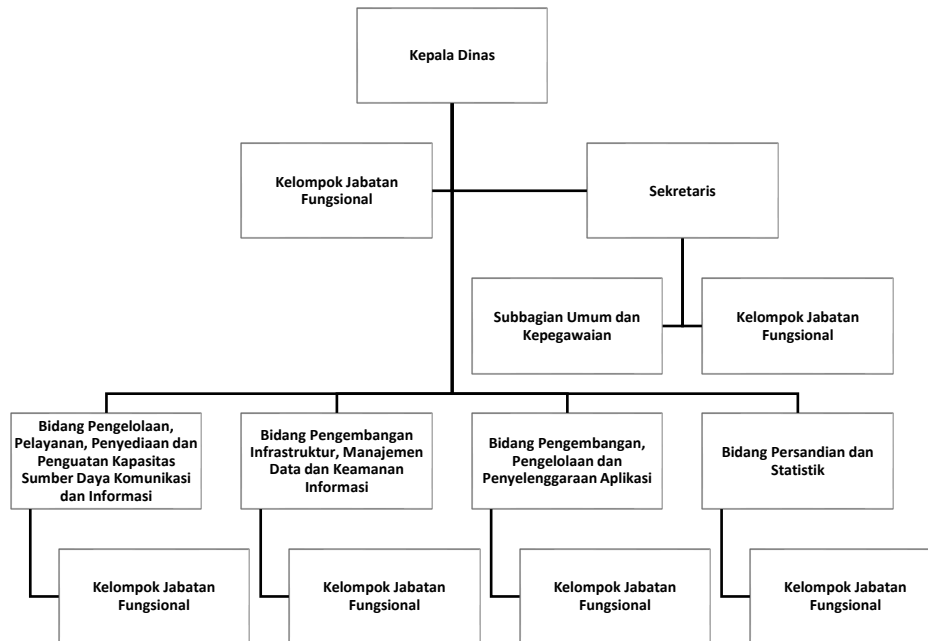
- o Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen

Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;

- Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik;
- Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, dan Bidang persandian dan Statistik; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**



Sumber : Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 26.712.038.938
APBD	Tahun n	Rp 12.709.528.352
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 & 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK adalah Mewujudkan transformasi layanan public berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	20	20.5	21	
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	BB	BB	BB
2	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	2.30	2.50	3.00	
		2.1	Meningktanya pelayanan administrasi pemerintahan secara elektronik dan	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
			penyelenggaraan	Persentase Organisasi Perangkat	50	75	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		informasi pelayanan public terintegrasi	Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			
			Cakupan data dan informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	100	100	100
			Persentase Tingkat keamanan data dan informasi pemerintah daerah	37	74	100

Sumber : Renstra DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	nilai	Hasil evaluasi RB atas komponen pengungkit	Total nilai tiap komponen penilaian RB	LHE Reformasi Birokrasi
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINAS	Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS	Nilai	Prediket Hasil Evaluasi AKIP DINAS	Total nilai bobot tiap komponen	LHE AKIP

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir		KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kab. Inhil oleh Inspektorat Daerah Kab. Inhil	penilaian akuntabilitas kinerja	
2	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	Indeks Hasil Evaluasi SPBE oleh KemenPANRB	Rata-rata nilai tingkat kematangan pada setiap domain indeks SPBE	LHE SPBE
2.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	Jumlah Layanan Publik Online yang Terintegrasi	Layanan Publik Online yang Terintegrasi	Bidang P3A
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persentase	Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Bidang PIMDKI
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia	Persentase	Jumlah OPD dan Instansi yang menyediakan	OPD dan Instansi yang menyediakan Data pada	Bidang Persantik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		secara online dan terintegrasi		Data pada Portal ISTAKA	Portal ISTAKA	
					Jumlah OPD dan Intansi	
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase	Jumlah OPD yang sudah melakukan audit Indeks KAMI	OPD yang sudah melakukan audit Indeks KAMI	Bidang Persantik
					Jumlah OPD	

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	nilai	20.5
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS	Predikat	BB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir		
2	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	2.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi		
			Indeks SPBE	Indeks	2.50
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	100
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persentase	75
			Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Persentase	100
			Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase	74

Sumber: Rencana Kerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	BB
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	75
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	100
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	74

Sumber: Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun
2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	27

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perundang-undangan yang disediakan	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	41
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	100
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10
2.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah	65

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	
2.1.3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	70
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Jumlah Aplikasi Pd Yang Jaringan Aplikasinya Di Awasi Oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil	92
		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK	75
3.1	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	90
3.1.1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1
3.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	32
3.1.3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2
3.1.4	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100
4.1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	74
5.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir	BB (73)	n/a	n/a	n/a	LHE AKIP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	50	50	Sangat Rendah	Bidang P3A
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	75	17	22.66	Sangat Rendah	Bidang PIMDKI
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	100	50	50	Sangat Rendah	Bidang Persantik
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	74	25	33.78	Sangat Rendah	Bidang Persantik

Sumber : data olahan LKPJ

Berdasarkan table di atas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Kabupaten Indragiri Hilir belum ada realisasi dikarenakan hasil indikator tersebut baru didapatkan pada perkiraan bulan maret 2026.

Realisasi capaian Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 50% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kesiapan OPD dalam mengelola sistem digital belum merata, serta masih ada

layanan yang belum terintegrasi dan baru berada pada tahap informatif. Meski belum optimal, capaian ini menunjukkan kemajuan, dan ke depannya akan terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan layanan digital agar target penuh dapat tercapai.

Rendahnya realisasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh dinas komunikasi Informatika, persandian dan statistik karena adanya rasionalisasi dan efisiensi ditahun 2025 yang menyebabkan berkurangnya anggaran penyediaan bandwidth.

Realisasi capaian Cakupan data dan informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi baru mencapai 50%, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan, sebagian data dan informasi pelayanan publik sudah tersedia secara online dan mulai terhubung, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini terjadi karena transformasi digital masih membutuhkan penguatan tata kelola, infrastruktur yang belum merata, serta proses integrasi sistem yang berjalan bertahap. Meski belum optimal, capaian ini menunjukkan kemajuan nyata, dan akan terus memperluas ketersediaan data serta memperkuat integrasi agar layanan publik online semakin lengkap dan mudah diakses.

Rendahnya capaian Persentase tingkat kewanaman data dan informasi pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keamanan data dan informasi. Infrastruktur pengamanan digital belum sepenuhnya tersedia, sehingga sistem perlindungan data belum berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.13	2.23	2.54	2.50	2.96	118.4
1.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	n/a	n/a	100	100	50	50
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	n/a	n/a	66.67	75	17	22.66
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	n/a	n/a	100	100	50	50
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	n/a	n/a	7.4	74	25	33.78

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	n/a	n/a	n/a	20.5	n/a	n/a
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	73.65	71.05	71.50	BB (73)	n/a	n/a

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indeks SPBE pada tahun 2025 mendapatkan hasil realisasi indeks SPBE dengan indeks 2.96, dengan realisasi tersebut melebihi dari target yang diharapkan, namun pada tahun 2024 yaitu dengan indeks 2.54, tahun 2023 dengan indeks 2.23 dan tahun 2022 dengan indeks 2.13, hal ini mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir.

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2025 mendapatkan realisasi 50% dan pada tahun 2024 dengan realisasi 100%, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perbedaan dalam perhitungan yang mengakibatkan realisasi 2025 menjadi rendah.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2025 mendapatkan realisasi 17%, realisasi ini tergolong sangat rendah dikarenakan adanya rasionalisasi dan efisiensi ditahun 2025 yang menyebabkan berkurangnya anggaran penyediaan bandwith, realisasi ini berbeda jauh dengan tahun 2024 yang mencapai 66.67%.

Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi tahun 2025 mencapai realisasi 50%, hasil ini kurang dari dari realisasi tahun 2024 yang mencapai 100% yang dimana semua OPD telah menginput data dan informasi pada ISTAKA, namun tahun 2025 sebagian data dan informasi pelayanan publik sudah tersedia secara online dan mulai terhubung, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini terjadi karena transformasi digital masih membutuhkan penguatan tata kelola, infrastruktur yang belum merata, serta proses integrasi sistem yang berjalan bertahap.

Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun tahun

2024 yang dimana pada tahun 2024 hanya dengan realisasi 7.4%, namun pada tahun 2025 menjadi 25%, yang dimana beberapa OPD telah menerapkan audit indeks KAMI, namun Rendahnya capaian ini disebabkan oleh kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keamanan data dan informasi. Infrastruktur pengamanan digital belum sepenuhnya tersedia.

Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit belum ada evaluasi dari beberapa tahun sebelumnya dan belum ada hasil realisasi.

Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil pada tahun 2025 belum mendapatkan penilaian karena penilaian diperkirakan pada bulan maret 2026, untuk realisasi 2024 mendapatkan nilai 71.50, pada tahun 2023 mendapat nilai 71.05 dan tahun 2022 dengan nilai 73.65, dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.96	3.00	98.66
1.1	Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara elektronik dan	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50	100	50

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh dinas komunikasi Informatika, persandian dan statistik	17	100	17
		Cakupan data dan informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	50	100	50
		Persentase tingkat keamanan data dan informasi pemerintah daerah	25	100	25
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	n/a	21	n/a
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	n/a	BB (73)	n/a

Sumber : data olahan

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa kemajuan capaian strategis pada dinas kominfops kab. Inhil mengalami kenaikan walaupun belum mendekati hasil akhir sesuai dengan target akhir perencanaan strategis yang telah ditetapkan, namun dengan hasil tersebut diharapkan mendekati hasil yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan strategis.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6)}{=4/5*100}$
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.96	3.23	91.64
1.1	Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan secara elektronik dan penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50	n/a	n/a
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh dinas komunikasi Informatika, persandian dan statistik	17	n/a	n/a
		Cakupan data dan informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	50	n/a	n/a
		Persentase tingkat keamanan data dan informasi pemerintah daerah	25	n/a	n/a
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	n/a	n/a	n/a
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	n/a	n/a	n/a

Sumber : data olahan

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.50	2.96	118.4		
1.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	50	50	Kesiapan OPD dalam mengelola sistem digital belum merata, serta masih ada layanan yang belum terintegrasi dan baru berada pada tahap informatif.	Memperkuat integrasi serta pemanfaatan layanan digital agar target penuh dapat tercapai
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	75	17	22.66	Adanya rasionalisasi dan efisiensi ditahun 2025 yang menyebabkan berkurangnya anggaran penyediaan bandwidth	Optimalisasi terhadap jaringan yang telah tersedia tetap dilakukan untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara	100	50	50	Sebagian data dan informasi pelayanan publik sudah tersedia secara online dan	Memperluas ketersediaan data serta memperkuat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		online dan terintegrasi				mulai terhubung, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini terjadi karena transformasi digital masih membutuhkan penguatan tata kelola, infrastruktur yang belum merata, serta proses integrasi sistem yang berjalan bertahap.	integrasi agar layanan publik online semakin lengkap dan mudah diakses.
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	74	25	33.78	Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keamanan data dan informasi. Infrastruktur pengamanan digital belum sepenuhnya tersedia, sehingga sistem perlindungan data belum berjalan optimal di seluruh perangkat daerah	Penguatan keamanan informasi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi, Persandian dan	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan	20.5	n/a	n/a		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit					
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	BB	n/a	n/a	Belum sepenuhnya menindaklanjuti tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya	Menyusun dan melaksanakan matriks tindak lanjut atas rekomendasi LHE AKIP tahun sebelumnya

Sumber : data olahan

Berdasarkan table diatas dapat dijelas bahwa analisis keberhasilan, kegagalan dan Solusi dari indikator kinerja belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dikarenakan masih kurangnya integrasi antar OPD dan masih minimnya sarana dan prasarana dalam memenuhi capaian yang diharapkan, selanjutnya beberapa solusi yang akan dilakukan perbaikan kedepannya.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks SPBE	2.50	2.96	118.4				
1.1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	50	50	5,830,815,750	5,776,173,750	99.06	0.94
1.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	75	17	22.66	627.101.500	612.681.000	97.70	2.30
1.3	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	100	50	50	189.359.000	48.734.040	25.74	74.26
1.4	Persentase Tingkat Keamanan Data dan	74	25	33.78	15.573.000	15.556.500	99.89	0.11

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Informasi Pemerintah Daerah							
2	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	20.5	n/a	n/a				
2.1	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	BB	n/a	n/a	6,046,679, 102	5,309,614, 293	87.81	22.19

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran untuk kinerja Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 50%, capaian anggaran sebesar 99.06% dengan efisiensi sebesar 0.94.

Untuk kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik dengan capaian 22.66%, capaian anggaran sebesar 97.70% dengan efisiensi sebesar 2.30

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	118.4					
1.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik yang tersampaikan	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi Berbasis TIK	50	Menunjang	Sistem pelayanan informasi berbasis TIK

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								telah mulai berjalan
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	22.66		Persentase Jumlah Aplikasi Pd Yang Jaringan Aplikasinya Di Awasi Oleh Dinas Kominfo Pers Kab.Inhil	33	Tidak Menunjang	Sebagian besar aplikasi PD masih dikelola secara mandiri oleh OPD masing-masing dan belum sepenuhnya ditempatkan pada server yang dikelola dinas kominfo
		Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	50	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	33.78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	5	Menunjang	Implementasi TTE memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Tingkat keamanan informasi pemda
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sistem persandian	80	Menunjang	Penggunaan TTE pada aplikasi SRIKANDI untuk administrasi mampu menjamin keaslian, integritas, serta otentikasi dokumen elektronik
2	Meningkatkan Implementasi Reformasi	Nilai Evaluasi RB Dinas Komunikasi, Informatika,	n/a					

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Birokrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	Persandian dan Statistik Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit						
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kab. Inhil	n/a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana	100	Menunjang	Realisasi telah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					administrasi perkantoran dalam kondisi baik			mencapai target yang ditentukan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100	Menunjang	Realisasi telah mencapai target yang ditentukan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	34.59	Menunjang	Realisasi tidak mencapai target disebabkan ada kendala pada kegiatan dan akan dilakukan replanning kedepannya agar bisa realisasi sesuai target

Sumber : LKPJ 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan rata-rata menunjang dalam menjalankan program kegiatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.146.250	19.420.000	96,39
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.410.322.097	3.104.233.895	91,02
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.320.000	4.320.000	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.699.375	2.694.995	99,84
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.239.790	224.517.157	94,38
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.700	9.989.886	99,90
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.970.000	Rp34.350.798	98,75
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.569.250	19.569.000	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.300.000	85,19
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.194.000	410.388.794	82,05
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.550.000	6.500.000	99,24

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.350.000	149.627.518	76,20
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.385.708.640	1.249.070.701	90,14
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.450.000	62.411.549	62,04
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.240.000	0	0
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.220.000	10.220.000	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	3.597.750	3.567.750	99,17
2.1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.357.718.000	5.307.006.000	99,05
2.1.3	Penyusunan Konten	469.500.000	465.600.000	99,17
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
3.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
3.1.1	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	183.022.000	182.425.200	99,93
3.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	23.000.000	23.000.000	100
3.1.3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	28.632.000	28.630.380	100
3.1.4	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	392.447.500	378.623.800	98,80
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
4.1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	189.359.000	48.734.040	25,74
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15.573.000	15.556.500	99,89

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian anggaran kegiatan tahun 2025 terlaksana sesuai target yang diharapkan dokumen anggaran

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK memiliki 5 sasaran strategis dengan 4 sasaran strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK adalah
 - a. Kesiapan OPD dalam mengelola sistem digital belum merata, serta masih ada layanan yang belum terintegrasi dan baru berada pada tahap informatif

- b. Adanya rasionalisasi dan efisiensi ditahun 2025 yang menyebabkan berkurangnya anggaran penyediaan bandwidth
- c. Sebagian data dan informasi pelayanan publik sudah tersedia secara online dan mulai terhubung, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini terjadi karena transformasi digital masih membutuhkan penguatan tata kelola, infrastruktur yang belum merata, serta proses integrasi sistem yang berjalan bertahap
- d. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keamanan data dan informasi. Infrastruktur pengamanan digital belum sepenuhnya tersedia, sehingga sistem perlindungan data belum berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat integrasi serta pemanfaatan layanan digital agar target penuh dapat tercapai.
2. Optimalisasi terhadap jaringan yang telah tersedia tetap dilakukan untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik.
3. Memperluas ketersediaan data serta memperkuat integrasi agar layanan publik online semakin lengkap dan mudah diakses.
4. Penguatan keamanan informasi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Tembilahan, Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik



Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820701 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Akasia Nomor 02, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212,
Email : diskominfops@inhilkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts.06/I/HK-2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 000.8.6.3/71/SETDA-ORG pada tanggal 18 Desember 2025 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 maka perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun

- 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini,
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Persandian Dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
Perubina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19820701 200012 1 001

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Ketua Tim Kerja PEP	Sekretaris
4.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kabid Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	Penata Layanan Operasional	Anggota
11.	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Persandian Dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir



Dhoan Dwi Anggara, S.STP., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820701 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jalan Akasia Nomor 02, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 29212,
Email : diskominfops@inhilkab.go.id
TEMBILAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Trio Beni Putra, SE., MM

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman

Jabatan : Bupati Indragiri Hilir

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran I perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Menyediakan dan mengelola data sektoral sesuai lampiran II perjanjian ini, berdasarkan perhitungan yang terukur dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tembilahan, Mei 2025

Pihak Kedua,
Bupati Indragiri Hilir



Herman

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik



Dr. Trio Beni Putra, SE., MM
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan secara elektronik dan penyelenggaraan informasi pelayanan publik terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah yang disediakan oleh dinas komunikasi informatika, persandian dan statistik	75
		Cakupan data dan informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	100
		Persentase tingkat keamanan data dan informasi pemerintah daerah	74
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kab. Inhil	Nilai akip dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kab. Inhil	73

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.6.604.620.392,-	APBD
2.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp.4.742.565.750,-	APBD
3.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Rp.638.171.500,-	APBD
4.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp.38.859.000,-	APBD
5.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Rp.11.078.000,-	APBD
Jumlah Anggaran		Rp.12.035.294.642,-	APBD

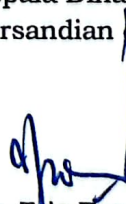
Tembilahan, Mei 2025

Pihak Kedua,
Bupati Indragiri Hilir



Herman

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Persandian dan Statistik



Dr. Trio Beni Putra, SE., MM
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN PEMENUHAN DATA SEKTORAL
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	JENIS DATA SEKTORAL	SATUAN	TAHUN DATA	TARGET PEMENUHAN
1	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	2025	03 Februari 2026
2	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah			
3	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain		
4	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah			
5	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah			
6	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			
7	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			
8	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo			
9	Data dan informasi dibagipakaikan	Data		
10	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi		
11	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit		
12	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit		
13	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit		
14	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit		
15	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit		
16	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		
17	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah		
18	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi		

19	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi		
20	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda			
21	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah		
22	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah		
23	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik		
24	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi		
25	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi		
26	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi		
27	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan		
28	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan		
29	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan		
30	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan		
31	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit		
32	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase		
33	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit		
34	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit		
35	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit		
36	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit		
37	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen		
38	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen		
39	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang		

40	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			
41	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi		
42	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang		
43	Audit TIK internal	Dokumen		
44	Audit TIK eksternal	Dokumen		
45	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang		
46	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan		
47	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan		
48	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal		
49	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan		
50	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen		
51	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan		
52	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP		
53	Konten Foto	Konten Digital		
54	Konten Teks	Konten		
55	Konten Grafis	Konten		
56	Konten Audio Video	Konten		
57	Konten Audio	Konten		
58	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten		
59	Pertemuan tatap muka	Kegiatan		
60	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan		
61	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan		
62	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan		
63	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan		
64	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang		
65	Media cetak yang dikelola Pemda	Media		
66	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran		
67	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio		
68	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media		
69	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda			
70	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers		
71	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers		

72	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas		
73	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		
74	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi		
75	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi		
76	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi		
77	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang		
78	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang		
79	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Orang		
80	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada		
81	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah		
82	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen		
83	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data			
84	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi			
85	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen		
86	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase		
87	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen		
88	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang		
89	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang		
90	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase		
91	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan		

92	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan		
93	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen		
94	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen		
95	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		
96	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah		
97	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan		
98	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan		
99	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan		
100	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan		

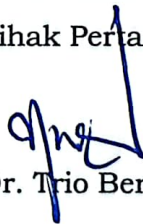
Tembilahan, Mei 2025

Pihak Kedua



Herman

Pihak Pertama



Dr. Trio Beni Putra, SE., MM

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025



PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

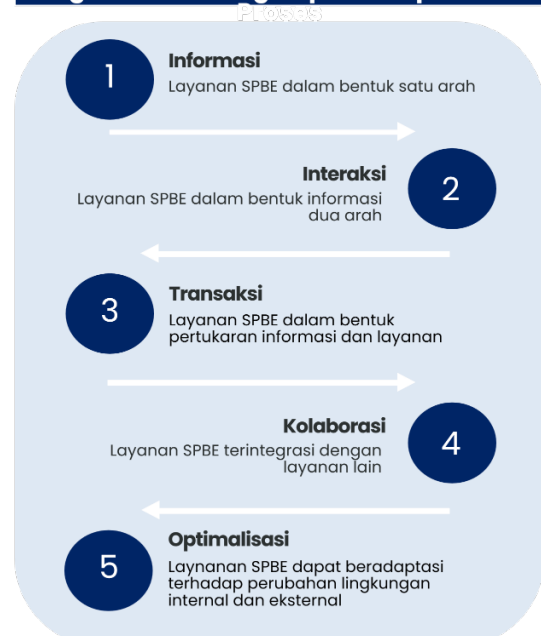
Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



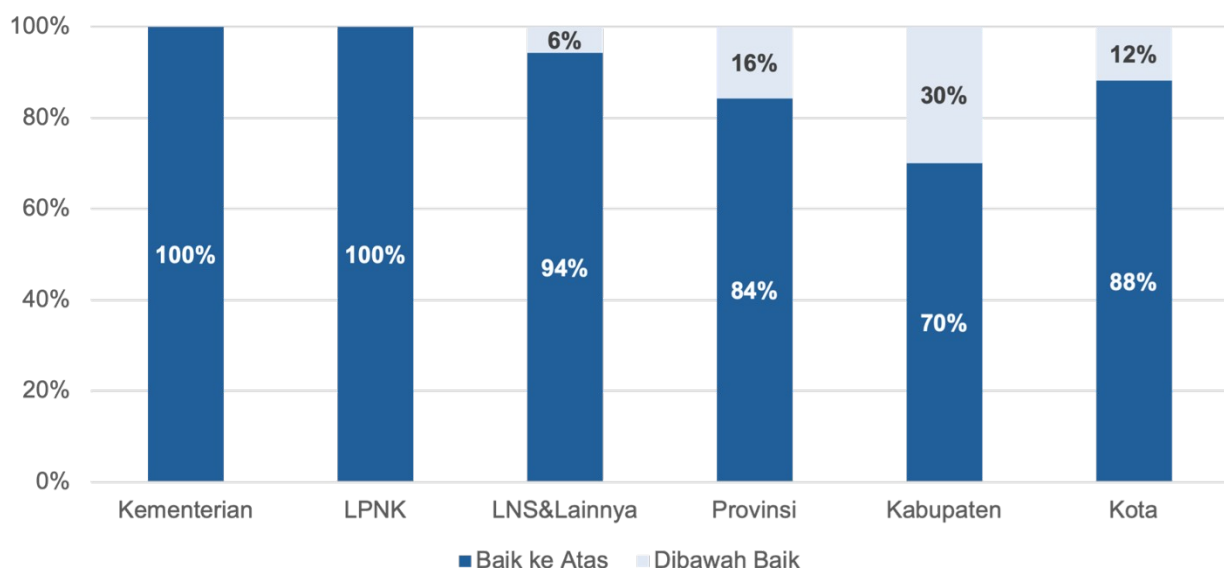
PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

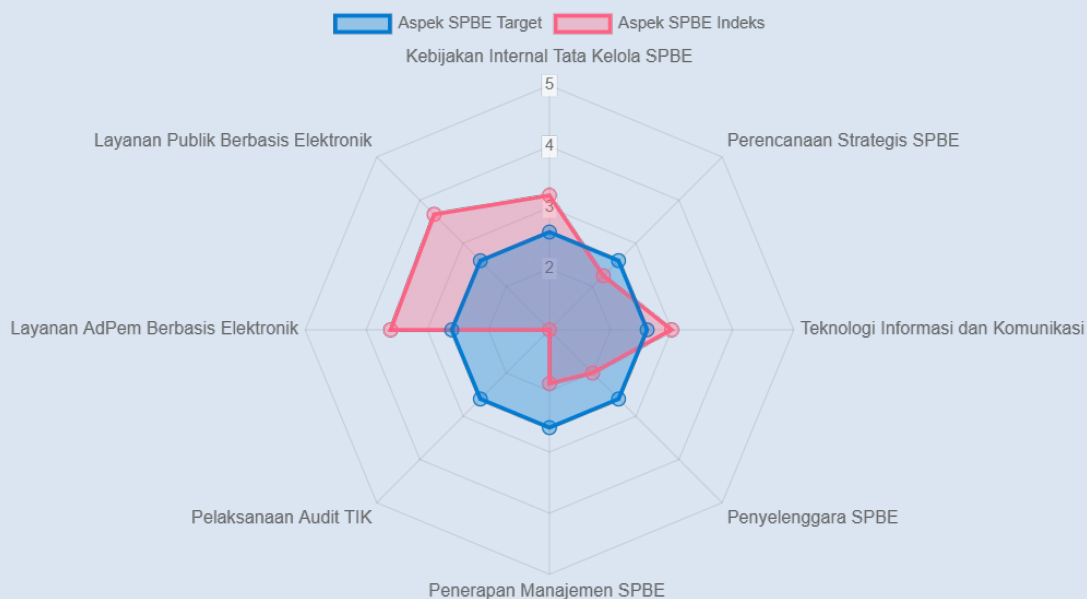
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	2,96
Domain Kebijakan SPBE	3,20
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,20</i>
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>2,25</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>3,00</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>2,00</i>
Domain Manajemen SPBE	1,64
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,88</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	3,63
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,60</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,67</i>

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

